

PENDIDIKAN, KEMANDIRIAN, DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Murniati Ruslan
Dosen Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu

Abstract

It goes without saying that education plays a very significant and strategic role in a nation development. Many states in the world, *in concerto*, have no many natural resources, but can build themselves as developed states. For example, Singapore, a Southeast Asian mini states that minus in natural resources. This state is successful in building itself as a prosper state of the world because it is supported by highly qualified human resources. It is necessary to elucidate, of course, that a qualified educational institution can produce qualified human resources. The reason is that education has not only a positive correlation with development, but also a rational way to create independence of society. This article elaborates educational matters, independence, and nation development.

Kata Kunci : Pendidikan, kemandirian, pembangunan

Pendidikan sebagai Kebutuhan Dasar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Bertolak dari definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sejatinya, fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, kualitas individu, meningkatkan mutu kehidupan, dan martabat manusia. Bahkan jika dicermati lebih jauh, sesungguhnya

pendidikan tidak hanya itu. Pendidikan juga seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembebas, yakni membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan penindasan (baca: Freire, 2000), dan lain sebagainya yang memerosotkan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Allah swt. yang paling mulia dan sempurna. Dengan kata lain, pendidikan mestinya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan yang semakin sarat dengan aneka tantangan. Kaitannya dengan pendidikan adalah bahwa masyarakat yang terberdayakan, sebagai hasil pendidikan tadi, diharapkan dapat mencapai tingkat kemandirian yang semakin tinggi. Jika kita sepakat untuk mengatakan bahwa pendidikan seharusnya berfungsi pula sebagai instrumen pemberdaya, maka tepatlah jika dikatakan bahwa pendidikan hanya layak diklaim berhasil sejauh pendidikan itu sendiri dapat menciptakan manusia-manusia mandiri dan bermartabat yang keberadaannya dapat memberikan manfaat terhadap keluarganya, orang lain, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Dalam kaitan ini, satu hal yang juga sangat penting digarisbawahi adalah bahwa manusia yang dapat memberi manfaat hanyalah manusia-manusia yang memiliki nilai tambah yang sebagiannya diperoleh lewat dunia pendidikan yang baik dan berkualitas tersebut. Nilai tambah, dalam konteks ini, adalah apa yang dikemukakan oleh Prof. B.J. Habibie, yakni meliputi kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas kreasi, dan kualitas hidup (lihat antara lain: Habibie, 1997).

Arti penting pendidikan juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagaimana diketahui, Pasal 4 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 tersebut menegaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Ketentuan ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan sesungguhnya adalah kebutuhan dasar manusia yang musti berlangsung sepanjang hayat manusia yang bersangkutan. Islam sendiri menegaskan agar kita menuntut ilmu sejak dari buaian ibu hingga ke liang lahat.

Pendidikan sebagai kebutuhan dasar dapat pula dijelaskan dalam perspektif interrelasi antara manusia sebagai *animal educandum* dan *animal educandus* sekaligus, yakni bahwa manusia adalah makhluk yang dididik dan sekaligus makhluk yang mendidik. Dengan

begitu, manusia sebetulnya adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Dalam arti inilah, ada alasan bagi Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (Unesco), sebagai badan internasional yang bergumul dengan berbagai masalah pendidikan dan kebudayaan untuk mencanangkan konsep “pendidikan sepanjang hayat” (*lifelong education*) yang berlangsung sejak dari buaian hingga liang lahat (*from the cradle to the grave*) (Hassan dalam Widiastono, 2004: 53).

Selain itu, pendidikan, pada dasarnya, juga adalah sebuah proses pembudayaan sebagaimana banyak dikemukakan oleh pakar pendidikan dan kebudayaan selama ini. Pada titik ini, memfungsikan lembaga pendidikan sebagai instrumen pembudayaan sangat terkait dengan ikhtiar untuk melestarikan nilai-nilai atau norma-norma budaya bangsa yang luhur yang penuh dengan ajaran untuk saling mencintai, tolong-menolong, toleransi, saling menghargai, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pembudayaan lewat pendidikan tidak lain adalah upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan demokratis dalam rangka melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Dalam konteks Indonesia dengan falsafah Pancasila, pendidikan sebagai pembudayaan harus pula diletakkan di dalam kerangka pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada konsep, prinsip-prinsip Pancasila, terutama pada nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terhimpun dalam falsafah tersebut. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta manusia-manusia Indonesia yang bermutu dan sekaligus mematuhi syarat-syarat yang dicita-citakan dalam kerangka Pancasila tadi.

Dalam kaitan ini, lewat pembudayaan dengan melibatkan dimensi pendidikan, maka diharapkan nilai budaya tersebut dapat menjadikan setiap insan Indonesia sebagai teladan yang aktif dan dinamis, sehingga keteladanan diwujudkan dalam bentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta kasih, tentram dan damai, menghargai kesetaraan gender, dan mengembangkan diri dan anggotanya dalam suasana demokratis dan peduli terhadap keadilan, tidak saja di antara anggota keluarganya, tetapi juga peduli terhadap sesamanya dalam lingkungan yang lebih luas.

Bahkan tidak hanya itu, pembudayaan diharapkan pula dapat menghasilkan dan menyemaikan budaya anti kekerasan dalam keluarga, menghargai nilai-nilai luhur budaya bangsa, anti kehidupan menyimpang, seperti pelecehan seksual terhadap perempuan, perkosaan dan anti penyalahgunaan obat atau bahan terlarang, baik oleh Agama maupun oleh hukum nasional, seperti narkoba dan lain sebagainya. Termasuk dalam nilai-nilai luhur budaya bangsa adalah memelihara sikap dan perilaku toleran mengingat Indonesia adalah sebuah negara-bangsa dengan multi-suku atau agama (baca: Kymlicka, 2003).

Terkait dengan uraian tersebut menyoal pembudayaan tadi, apa yang dikemukakan oleh Sastapratedja, seorang praktisi dan pakar pendidikan tentunya sangat menarik dicermati. Dikatakannya, bahwa sejauh manusia merupakan makhluk budaya yang hanya dapat menyempurnakan diri dengan membudaya, maka pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas membudaya. Pendidikan, dengan demikian, adalah usaha manusia untuk menyerap kebudayaannya. Perkembangan manusia yang bertahap mengandung makna antropologis, bahwa ia harus menyerap kebudayaan dan memperkembangkannya lebih lanjut. Maka, seperti dikatakan John Dewey, pendidikan adalah keharusan hidup (Sastraprateja dalam Widiastono, 2004: 9).

Hal senada juga dikemukakan oleh Komaruddin Hidayat, seorang praktisi pendidikan dan intelektual Muslim ternama. Prof. Komaruddin Hidayat mengatakan, bahwa untuk menjaga identitas diri tanpa harus bersikap eksklusif, sejak dini siswa hendaknya diperkenalkan dan dibiasakan memahami dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan serta cinta bangsa. Apa yang disebut *core values* atau *living values* yang berakar pada ajaran agama dan warisan luhur bangsa dijadikan bagian dari kultur sekolah. Namun, menurutnya, ini jangan berhenti sebagai sebuah slogan, tetapi benar-benar diaplikasikan secara nyata dan terukur (Hidayat dalam Widiastono, 2004: 104).

Dari uraian di atas tampak bahwa pendidikan, pembudayaan dan pembelajaran adalah tiga hal yang saling terkait satu sama lain. Ketiganya saling melengkapi. Sejalan dengan itu, untuk menciptakan pendidikan sebagai proses pembudayaan, maka syarat yang diperlukan adalah terciptanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang

efektif serta tersedianya lembaga-lembaga pendidikan yang sepadan dan terkait. Tentang sarana pembudayaan itu, Indonesia telah memilikinya yang dinilai cukup andal, seperti sejak lama dikembangkan di pesantren, masjid dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, sehingga yang dibutuhkan sesungguhnya adalah revitalisasi lembaga-lembaga tersebut. Persoalan utamanya justru terletak pada sarana pengajaran. Inilah tantangan dunia pendidikan di Indonesia hingga saat ini (Habibie, 1997: 51-52).

Bertolak dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Pendidikan, dengan demikian, sebetulnya bukan hanya suatu kebutuhan dasar, akan tetapi sekaligus pula suatu keharusan (Sastrapratedja dalam Widiastono, 2004: 6). Dan seperti dikatakan Dewey, pendidikan bagi manusia adalah hakikat hidup untuk berusaha melangsungkan keberadaannya (Habibie, 1997: 9). Atau dalam perspektif Battye dan Patterson (dalam Cam, dkk., 1999), pendidikan adalah *teaching people to think* untuk membentuk *trained mind*, yakni manusia-manusia dengan pikiran yang terlatih secara baik lewat proses pembelajaran.

Pendidikan dikatakan sebagai kebutuhan dasar manusia, dengan demikian, karena sesungguhnya pendidikan membantu dan memberdayakan manusia untuk membangun daya kekuatan yang kreatif, dan mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Lebih dari itu, pendidikan juga membantu dan memberdayakan manusia untuk membangun kekuatan bersama, solidaritas atas dasar komitmen pada tujuan dan pengertian yang sama, untuk memecahkan persoalan yang dihadapi guna menciptakan kesejahteraan bersama. Selain itu, pendidikan juga membantu dan memberdayakan manusia untuk membangun daya kekuatan batin dalam dirinya, khususnya harga diri, rasa percaya diri, dan harapan akan masa depan (Widiastono, 2004: xiv). Singkatnya, dari pendidikan akan lahir kekuatan-kekuatan yang dapat membantu manusia membangun kepribadian. Tanpa kepribadian atau harga diri, sangat sulit bagi manusia untuk membangun kemampuan kreatifnya.

Keseluruhan paparan di atas menjelaskan urgensi-urgensi pendidikan sebagai suatu kebutuhan dasar. Kesadaran para pendiri republik ini akan arti dan makna pendidikan tersebut tercermin secara tegas di dalam konstitusi UUD 1945. Dengan kata lain, kalau kita

merujuk pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka jelas bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Penegasan konsep hak ini didasari oleh pemikiran bahwa pendidikan itu sendiri adalah suatu kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana dapat disimak, Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara gamblang menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.” Bahkan bukan hanya itu, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) ditegaskan, bahwa pendidikan sesungguhnya adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur pada Pasal 12 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Reformasi Sistem Pendidikan dan Tuntutan Globalisasi

Fakta akan rendahnya mutu lulusan lembaga pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia atau Thailand, menjadi alasan yang sah bahwa sudah saatnya untuk melakukan reformasi sistem pendidikan nasional. Bahkan harus ditegaskan bahwa reformasi dan pembaruan sistem pendidikan nasional agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dewasa ini, sudah menjadi suatu keharusan yang harus direalisasikan secepatnya.

Sejalan dengan itu, adalah suatu fakta yang makin sulit dipungkiri adalah bahwa siapa pun yang terlibat dalam dunia pendidikan di Indonesia merasakan adanya semacam ketidakpastian dengan sistem pendidikan yang kita miliki saat ini. Maka, tak mengherankan jika kecepatan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta kemajuan di bidang informatika membuat kinerja lembaga pendidikan kita *megap-megap* dalam memenuhi panggilan tugasnya. Ada ketegangan antara dimensi formatif-humanistis pendidikan dan dimensi teknis-praktis yang dimiliki alumni untuk dapat memasuki dunia kerja. Ini terjadi karena kemajuan teknologi informasi ternyata jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan lembaga-lembaga pendidikan kita dalam mencermati kurikulum,

metode dan sarana yang dimilikinya, agar menghasilkan orang-orang yang siap memasuki dunia kerja (Koesoema dalam Widiastono, 2004: 198-199).

Dalam situasi yang demikian ini, yang dipertanyakan terkait dengan sistem pendidikan kita semakin *complicated* karena masalahnya kemudian bukan lagi hanya menyangkut relevansi pendidikan bagi para alumni dalam kerangka persiapan mereka memasuki dunia kerja, berupa pembekalan teoretis-praksis-teknis sesuai tuntutan zaman dan teknologi. Akan tetapi, masalahnya sudah sedemikian serius karena telah menyangkut relevansi dimensi struktural pedagogis-didaktis, berupa tehnik pengajaran, kurikulum, metode, tempat belajar, dan lain sebagainya (Koesoema dalam Widiastono, 2004: 199).

Namun lebih dari itu, reformasi apapun yang dilakukan dalam bidang pendidikan tanpa memperhatikan dimensi religi atau teleologis pendidikan, hanya akan menghasilkan sebuah proses memutar, gerakan jalan di tempat, dan dikhawatirkan mudah terjerumus ke dalam perilaku reaktif karena sempitnya wawasan. Harus diwaspadai, bahwa degradasi kemanusiaan merupakan harga yang harus dibayar bagi reformasi pendidikan yang digarap serampangan (Koesoema dalam Widiastono, 2004: 199). Dengan kata lain, upaya ini harus sekaligus mengutamakan pemberdayaan manusia agar berkembang menjadi insan yang rasional yang penuh iman, taqwa, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian mantap (Suyono, 2003: 112). Dalam perspektif B.J. Habibie, hal itu disebut kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas kreasi, dan kualitas hidup (Habibie, 1997: 56).

Urgensi reformasi sistem pendidikan nasional tampaknya semakin niscaya manakala ia dihadapkan dengan globalisasi yang terus bergerak dengan sangat cepat dan dinamis. Sejalan dengan itu, sebagai suatu entitas yang terkait dalam budaya dan peradaban manusia, pendidikan di berbagai belahan dunia mengalami perubahan yang amat mendasar dalam era globalisasi. Fenomena ini digambarkan oleh Charles Dickens dalam kata-kata berikut: *it's the best of times and the worst of times*, ini adalah masa paling baik sekaligus paling buruk. Masalahnya adalah bahwa dewasa ini terdapat banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia. Akan tetapi pada saat yang sama, kemajuan itu juga

beriringan dengan kesengsaraan banyak anak manusia (Lie dalam Widiastono, 2004: 217).

Maka, dalam era globalisasi sekarang ini, pendidikan di Indonesia, mau tak mau, harus dipersiapkan sebagai laboratorium untuk menyiapkan anak-anak bangsa menghadapi masa depan sebagai langkah awal untuk menjadikan bangsa ini bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari proses demokratisasi dan pembangunan bangsa. Karena sesungguhnya pendidikan membentuk masa depan bangsa. Namun, pendidikan yang masih menjadi budak sistem politik masa kini telah kehilangan jiwa dan kekuatan untuk memastikan reformasi bangsa sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan berjalan di atas rel yang tepat. Dengan kata lain, dalam konteks globalisasi, pendidikan di Indonesia perlu membiasakan anak-anak memahami eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain dan segenap persoalan dunia (Lie dalam Widiastono, 2004: 217).

Reformasi sistem pendidikan nasional juga semakin terasa sebagai suatu keharusan jika kita sepakat untuk mengatakan bahwa dewasa ini era industrialisasi sudah berganti dengan era informasi atau komunikasi (Lihat: Joesoef dalam Priyono dan Pranarka, 1996). Masalahnya adalah bahwa paradigma dan praktik pendidikan untuk era informasi tentu berbeda dengan paradigma dan praktik-praktik untuk era industrialisasi. Laju informasi yang beredar sudah tidak bisa dikendalikan, baik dari segi jumlah maupun jenis dan dampaknya bagi anak. Melalui berbagai media elektronik (televisi, internet dengan segala variannya), anak-anak diserbu oleh banjir informasi secara dahsyat. Sebagian informasi itu memang bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap anak. Namun, sebagian lain justru bisa merusak anak-anak karena mengandung banyak unsur yang tidak sesuai untuk konsumsi anak, misalnya kekerasan dan pornografi (Lie dalam Widiastono, 2004: 224).

Maka dari itu, satu keterampilan hidup yang sangat penting dalam era informasi atau komunikasi ini adalah keterampilan mencari, menyaring, memilah, dan memanfaatkan informasi dengan benar dan membuang informasi yang tidak berguna dan merusak. Agar anak bisa memperoleh keterampilan ini, praktik-praktik di sekolah yang berdasarkan model pendiktean, penghafalan, indoktrinasi, dan deduksi

sudah tidak sesuai zamannya. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan untuk menjelajahi kehidupan melalui proses pencarian dan penemuan di sekolah. Akan tetapi, disayangkan bahwa pada kenyataannya, sekolah yang sudah mengadopsi paradigma yang sesuai dengan era informasi masih sangat sedikit jumlahnya (Lie dalam Widiastono, 2004: 225).

Terkait dengan era informasi adalah teknologi. Pencarian, penyaringan, pemilahan, dan pemanfaatan informasi dapat dipermudah dengan penggunaan teknologi komputer dan internet. Itulah sebabnya penguasaan teknologi komputer dan internet merupakan salah satu keterampilan hidup yang sangat penting. Atas dasar itu, siswa atau mahasiswa perlu dikondisikan dan diberikan kesempatan untuk menguasai keterampilan hidup ini (Lie dalam Widiastono, 2004: 224).

Maka mencermati keseluruhan uraian di atas, tampaklah bahwa reformasi sistem pendidikan kita memang seharusnya dimulai dari gerakan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang masih sangat rendah. Untuk itu, ada lima sasaran utama yang harus dilakukan dengan komitmen dan dukungan program dan anggaran yang memadai, terpadu dan dinamik dari pemerintah dan aparatnya di seluruh pelosok Tanah Air. Sasaran-sasaran tersebut adalah: Pertama, peningkatan pemberdayaan siswa secara konsisten dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan mutu, kemampuan dan kesejahteraan guru. Ketiga, penyempurnaan kemampuan dan kesiapan sekolah untuk memberikan dukungan terhadap aktivitas kependidikan dan pengajaran yang dinamik, padat, dan relevan dengan perkembangan masyarakatnya. Keempat, pengembangan kesadaran orang tua untuk mengirim dan memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk belajar sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Kelima, pengembangan budaya masyarakat yang kondusif serta mendukung upaya belajar dalam suasana nyaman, menggairahkan, dan dinamik (Suyono, 2003: 112).

Uraian tersebut di atas sekaligus menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor anak didik semata-mata. Akan tetapi, suatu pendidikan hanya dapat berhasil jika dapat digalang sinergi positif antara anak didik, orang tua, lingkungan masyarakat, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Sinergi positif ini menjadi sangat penting, karena bagaimanapun, *out put* pendidikan

(baca: lulusan lembaga pendidikan) kelak akan menjadikan masyarakat atau lingkungan menjadi arena pengabdianya kelak apabila anak didik sudah menyelesaikan pendidikannya untuk selanjutnya memasuki dunia kerja. Di dunia perguruan tinggi, upaya untuk menciptakan sinergi positif yang demikian itu, dapat dicermati pada kebijakan KKN (kuliah kerja nyata) yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa sebelum merampungkan studinya pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam program yang disebut tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sebagaimana diketahui, tridharma perguruan tinggi adalah misi yang harus dijalankan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia.

Membangun Kemandirian Lewat Pendidikan

Pendidikan, sebagai salah satu fungsi persekolahan, sesungguhnya ditujukan untuk menciptakan manusia-manusia mandiri. Akan tetapi, pada saat yang sama, pendidikan juga merupakan instrumen untuk menata relasi antarmanusia dalam lingkungan tertentu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dalam konteks ini, bagaimana menempatkan dan menggunakan keduanya dalam suatu gerak harmoni, tidak hanya menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan semata, tetapi di dalamnya sudah terlibat berbagai elemen. Dengan kata lain, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan sebetulnya merupakan tanggungjawab semua komponen bangsa, mulai dari individu hingga pemerintah.

Dalam pada itu, setiap manusia pada dasarnya adalah individu yang memiliki subyektifitas batin sendiri, yang tak terjangkau oleh yang lain dan yang tak sepenuhnya dapat diekspresikan. Ada kedalaman dalam setiap individu yang mewujudkan individualitasnya. Karena pada dasarnya setiap individu adalah wajah yang unik. Setiap individu tak tergantikan, kecuali kalau kita melihatnya secara fungsional saja. Setiap individu memiliki identitas diri yang membedakannya dari yang lain. Setiap individu adalah pusat kebebasan dan kreativitas yang unik, yang membentuk kisah kehidupan (Sastrapratedja dalam Widiastono, 2004: 14)..

Maka, upaya menjadikan pendidikan sebagai jalan menciptakan kemandirian, baik dalam konteks individu maupun masyarakat, dengan demikian, dapat dijelaskan dalam konteks relasi

antara kepentingan manusia atau setiap orang terhadap pendidikan itu sendiri. Terhadap hal ini, dapat dikemukakan bahwa pendidikan mencakup sekurang-kurangnya tiga kepentingan manusia.

Pertama, pendidikan bertujuan agar manusia dapat menguasai lingkungannya melalui ilmu dan teknologi. Di sinilah sebetulnya kebebasan manusia menjadi kentara, karena di situ manusia mampu untuk mengubah, mencipta, dan mencipta kembali dunianya. Namun, di sini pula kelihatan bagaimana kebebasan manusia dipertaruhkan. Manusia dapat menggunakan ilmu dan teknologi untuk mendukung kesejahteraan manusia, tetapi dapat juga menghancurkan manusia. Karena itu, apa yang disebut Hans Jonas dengan pendidikan “etika tanggung jawab” merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan ilmu dan teknologi tadi.

Kedua, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada komunikasi dengan sesamanya, tetapi juga dengan generasi masa lampau, melalui studi sejarah dan dengan tradisi yang ditafsirkan kembali. Kemampuan menafsirkan sejarah dan tradisi menjadi sangat penting dalam usaha mengembangkan identitas diri.

Ketiga, pendidikan membiasakan orang untuk menjadi kritis terhadap berbagai determinisme dan tindakan otoritarian, totalitarian (Sastrapratedja dalam Widiastono, 2004: 10), bahkan melakukan otokritik secara jujur, sportif, dan elegan. Pendapat ini didasarkan atas suatu rasionalitas bahwa pada dasarnya manusia mengada (*being*) karena ia ada di dalam suatu situasi. Dan ia akan semakin mengada bila ia semakin tidak hanya berpikir kritis terhadap eksistensinya, tetapi juga bertindak kritis terhadapnya (Freire, 2000: 103).

Dari uraian di atas, tampak bahwa manusia membutuhkan apa yang disebut pendidikan untuk memberdayakan dirinya secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Jika tujuan ini sudah tercapai, maka apa yang kini disebut kemandirian individu dengan mudah dapat digapai. Dengan demikian, kemandirian individu merupakan hasil atau refleksi dari adanya keberdayaan tadi. Artinya, kemandirian hanya dapat digapai oleh mereka yang sudah terberdayakan terlebih dahulu. Secara demikian, kemandirian dan keberdayaan, sebagai hasil dari pemberdayaan, sesungguhnya adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Ikhtiar untuk memperkuat peran pendidikan sebagai pilar kemandirian juga hanya dapat tercapai jika tersedia sarana pendidikan yang memadai. Salah satu komponen yang sangat terkait dengan sarana pendidikan ini adalah gedung sekolah tempat kegiatan belajar-mengajar berlangsung. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa dunia pendidikan kita masih bergelut dengan buruknya sarana pendidikan. Buruknya sarana pendidikan ini telah memakan banyak korban anak-anak sekolah. Salah satunya adalah yang dialami oleh Dicky Bastian (7 tahun), murid SDN 2 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia meninggal karena tertimpa pilar bangunan sekolah yang tiba-tiba roboh ketika Dicky dan murid lainnya tengah belajar di dalam kelas.

Di Indonesia, kondisi sekolah yang buruk sebetulnya bukanlah cerita baru. C.E. Beeby, seorang konsultan pendidikan dari Selandia Baru, dalam laporannya bertajuk *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan* (LP3ES, 1981), pada awal dekade 1970-an mencatat, hanya 50 persen gedung-gedung sekolah itu bersifat permanen; 10-15 persen dari gedung-gedung sekolah itu sudah sangat memerlukan perhatian dan tidak memenuhi syarat kesehatan (Darmaningtyas dalam Widiastono, 2004: 264-265).

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa pendidikan adalah jalan terbaik dalam rangka menciptakan kemandirian, baik dalam dimensi individu, masyarakat maupun bangsa. Sejarah telah mencatat, bahwa negara-negara yang didukung oleh manusia-manusia terdidik dan terampil, akan dapat mengukuhkan dirinya sebagai bangsa mandiri dalam berbagai dimensinya. Sebut misalnya, dalam bidang pemenuhan kebutuhan akan teknologi, pengembangan Iptek, pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Meskipun disadari sepenuhnya bahwa tidak satu pun negara di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, dalam arti tanpa keterkaitan dengan pihak lain atau negara lain.

Penutup

Pada bagian penutup ini, akan dikemukakan beberapa catatan, sebagai berikut:

Pertama, bagi bangsa Indonesia, pendidikan, kemandirian, dan pembangunan jelas merupakan tiga kebutuhan yang sangat

diperlukan agar dapat mengukuhkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ketiga hal tersebut saling terkait satu sama lain. Artinya, pendidikan yang baik harus dapat menciptakan manusia-manusia yang mandiri dalam sebanyak mungkin bidang kehidupan, misalnya ekonomi dan politik. Demikian pula, kemandirian dalam melaksanakan pembangunan sangat diperlukan oleh suatu bangsa agar dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat

Kedua, globalisasi menghadapkan negara-negara atau seluruh bangsa di seluruh dunia pada tantangan-tantangan yang semakin dahsyat dan bersifat multidimensi, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Sejalan dengan fenomena globalisasi itu, tuntutan terhadap kemajuan dan kemandirian masyarakat juga semakin tinggi. Dalam hal ini, kemandirian suatu bangsa, masyarakat atau bahkan individu dalam era globalisasi dewasa ini sudah merupakan suatu kebutuhan mutlak. Dengan kata lain, bangsa, masyarakat atau individu yang tidak mampu memberdayakan dirinya, misalnya lewat ikhtiar pendidikan, dapat dipastikan akan tidak mampu bersaing dalam era globalisasi yang sangat sarat kompetisi itu. Dalam kata-kata yang sedikit membuat ‘bulu kuduk’ merinding: mereka yang tidak mampu berkompetisi dalam era globalisasi akan terlibas oleh derasnya arus globalisasi yang seringkali tidak mengenal belas kasihan.

Ketiga, lembaga pendidikan di Indonesia, apakah itu universitas, institut, sekolah tinggi atau apa pun namanya, tengah menghadapi tantangan berat. Untuk masa yang akan datang, dapat dipastikan tantangan itu akan semakin berat dan kompleks. Selain karena semakin tinggi dan banyaknya kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan itu sendiri, juga karena era globalisasi dan liberalisasi memaksa kita untuk harus dapat berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan serupa di negara lain. Jika tidak, lambat laun lembaga pendidikan kita akan semakin ditinggalkan dan tidak diperhitungkan bahkan oleh orang Indonesia sendiri.

Keempat, pembangunan bangsa adalah sebuah proses yang tidak boleh berhenti. Ia harus terus berlanjut dengan dinamikanya sendiri. Dalam konteks ini, pembangunan hanya dapat dilancarkan secara berkesinambungan jika ditopang oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu saja, sumber daya manusia yang berkualitas itu adalah produk dari lembaga pendidikan yang baik dan

berkualitas pula. Dan patut dicermati, bahwa manusia-manusia yang berkualitas itu tidak hanya memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, akan tetapi juga memiliki sikap, perilaku dan budi pekerti yang terpuji. Dengan kata lain, idealnya, manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang memiliki lima kualitas berikut, yakni kualitas iman, kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas kreasi, dan kualitas hidup.

Daftar Pustaka

- Cam, Philip. *et al.*, (editor). 1999. *Philosophy, Culture and Education*, diterbitkan atas kerja sama Korean National Commission for Unesco dengan The Asia-Pacific Philosophy Education Network for Democracy.
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Kaum Tertindas, Cetakan Ketiga*. Jakarta: LP3ES.
- Habibie, B.J. 1997. *Ilmu Pengetahuan, Teknologi & Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka (Penyunting). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies).
- Suyono, Haryono. 2003. *Memotong Rantai Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Damandiri.
- Widiastono, Tonny D. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.